

# ANALISIS HUBUNGAN ANTARA LAPORAN LABA RUGI PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA DENGAN SETORAN PPH BADAN PADA KPP PRATAMA SAMARINDA

Oleh :

*Ahmad Albara Dipayana, Robin Jonathan, Heriyanto*

Email : [ahmad.dipayana@gmail.com](mailto:ahmad.dipayana@gmail.com)

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to know and analyze: (1) the effect of income statement elements (total sales, gross profit, maintenance expense, depreciation expense and net income) partially to the amount of corporate income tax (2) the effect of income statement elements (total sales, gross profit, maintenance expense, depreciation expense and net income) simultaneously to the amount of corporate income tax.*

*The technique of data collecting was done by using method of documentation. Prior to analysis, prerequisite analysis test is done included normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test. Analysis of data that used to test the hypothesis is using multiple regression analysis techniques.*

*Based on the results of data analysis can be concluded that the sales and net profit variables partially significant affect the amount of corporate income tax, this is indicated by the value of t-count of sales 2.092 and t-count of net profit 5.960 are greater than t-table 2.0639. Gross profit, maintenance expense and depreciation expense variables have no significant effect to the amount of corporate income tax, this is indicated by the t-count of gross profit 0.210, the t-count of maintenance expense -0.268, and the t-count of depreciation expense 1.541 are smaller than the t-table 2.0639. The research conclusion of this hypothesis is rejected.*

*Meanwhile, simultaneously all the independent variables such as sales, gross profit, maintenance expense, depreciation expense, and net profit have a significant effect on the amount of corporate income tax, this is indicated by F-count 47.81 are greater than F-table 2.62. The research conclusion of this hypothesis is accepted.*

*Keywords: Sales, Gross Profit, Net Income, Tax Payable, Corporate Income Tax*

## **PENDAHULUAN**

Batubara adalah kekuatan dominan di dalam pembangkitan listrik. Paling sedikit 27 persen dari output energi total dunia dan lebih dari 39 persen seluruh listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga batubara karena kelimpahan batubara, perolehan batubara yang relatif mudah dan murah, termasuk mudahnya kebutuhan infrastruktur dibandingkan dengan sumber daya energi lain. Indonesia memiliki cadangan berlimpah untuk batubara kualitas menengah dan rendah. Jenis batubara ini dijual dengan harga kompetitif di pasar internasional

(sebagian karena upah tenaga kerja Indonesia yang rendah).

Pendirian perusahaan batubara tentunya bermotif untuk memaksimalkan perolehan laba. Laba merupakan selisih pendapatan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu pengukur aktivitas operasi Perusahaan dan dihitung berdasarkan atas dasar akuntansi akrual. Laba adalah selisih lebih antara seluruh pendapatan (revenue) dan beban (expense) yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Atas laba bersih perusahaan

akan dikenakan pajak penghasilan badan sesuai dengan ketentuan.

Ada beberapa jenis pajak yang disumbangkan oleh wajib pajak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP) itu antara lain Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) yang dikenal dengan istilah PPh Pasal 25/29. PPh ini sangat terkait dengan kondisi keuangan perusahaan, di mana semakin untung perusahaan, maka PPh-nya akan semakin besar.

*Trend* harga batu bara acuan semakin tinggi sejak tahun 2013 – 2015 dan hingga sekarang, sehingga keuntungan penjualan perusahaan batu bara juga ikut meningkat akibat naiknya harga batu bara acuan. Dan jika laba perusahaan batu bara meningkat tentunya akan mengakibatkan PPh Badannya semakin besar. Karena pajak ini menganut sistem angsuran (lumpsum), maka angsuran (PPh Pasal 25) bulannya juga akan semakin besar.

Menurut data yang diperoleh dari Centre for Tax Analysis Direktorat Jenderal Pajak, dari 851 Wajib Pajak yang berkantor pusat di wilayah Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara diketahui tidak semua melakukan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan. Dari tabel di atas diketahui bahwa dari tahun pajak 2013 hingga 2015 jumlah Wajib Pajak perusahaan batu bara yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan semakin menurun.

Khususnya untuk KPP Pratama Samarinda yang terdapat 247 Wajib Pajak perusahaan batu bara yang berkantor pusat di wilayahnya, tingkat kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan sangatlah rendah. Dari range tahun 2013 – 2015 tertinggi hanya 29 Wajib Pajak yang melakukan pembayaran jenis pajak tersebut.

Menurut data yang diperoleh dari Centre for Tax Analysis Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak pemegang Izin Usaha Pertambangan di Indonesia khususnya di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, diketahui bahwa mulai tahun 2013 hingga 2015 jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak semakin menurun baik secara keseluruhan di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara maupun di KPP Pratama Samarinda.

Menurut data yang diperoleh dari Centre for Tax Analysis Direktorat Jenderal Pajak untuk KPP Pratama Samarinda, terdapat kenaikan omset yang cukup signifikan sekitar 77% untuk Wajib Pajak di KPP Pratama Samarinda dari tahun 2013 ke 2014 namun tidak berbanding lurus dengan besarnya PPh Badan Terutang. PPh Badan Terutang pada tahun 2014 malah menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013. Kesenjangan tersebut bisa terjadi dikarenakan nilai harga pokok penjualan di tahun 2014 juga ikut meningkat, atau terdapat kemungkinan bahwa ini salah satu contoh penghindaran pajak (tax avoidance).

Dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penelitian yang selama ini telah dilakukan belum dapat menjawab apakah dengan meneliti hubungan unsur – unsur laporan laba rugi perusahaan batu bara akan berkaitan untuk mengukur PPh Badan terutang. Padahal dengan mengetahui hubungan tersebut, dapat membantu petugas pajak untuk mengetahui kecenderungan Wajib Pajak dalam praktek penghindaran pajak (tax avoidance) maupun untuk Wajib Pajak untuk memahami penyajian laporan keuangan yang benar menurut ketentuan perpajakan.

Kesimpulan dari penjelasan latar belakang di atas adalah kesenjangan yang mungkin terjadi oleh perusahaan yang memiliki laba yang besar namun menyeteror pajak penghasilan badan yang kecil karena memodifikasi kebijakan atau menampilkan biaya-biaya yang mempengaruhi pengurangan pajak (tax avoidance). Kenyataan ini juga bisa saja terjadi dengan cara menimbulkan permainan kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya atau dengan cara transfer pricing dengan perusahaan boneka.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan pada sub bab di atas maka penulis mulai memfokuskan permasalahan apa yang terjadi dan akan diteliti oleh penulis yaitu pengaruh penjualan bersih dengan setoran pajak tidak berbanding lurus karena setiap perusahaan memiliki variasi kebijakan akuntansi dalam pengakuan pembebanan biaya yang mempengaruhi pengurangan pajak penghasilan badan. Selain itu, perlu mengetahui pengaruh laba kotor dan laba bersih perusahaan dengan setoran pajak karena

struktur total penjualan, harga pokok penjualan, biaya-biaya lainnya yang disusun agar dapat menjadi pengurang pajak penghasilan badan.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah unsur-unsur laporan laba rugi (total penjualan, laba kotor, beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan laba bersih) perusahaan tambang batu bara baik secara parsial berpengaruh terhadap setoran pajak penghasilan badan pada 10 perusahaan tambang pemegang Kuasa Pertambangan (KP) di Samarindapada tahun 2013-2015?
2. Apakah unsur-unsur laporan laba rugi (total penjualan, laba kotor, beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan laba bersih) perusahaan tambang batu bara baik secara simultan berpengaruh terhadap setoran pajak penghasilan badan pada 10 perusahaan tambang pemegang Kuasa Pertambangan (KP) di Samarindapada tahun 2013-2015?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara keterkaitan unsur-unsur laporan laba rugi (total penjualan, laba kotor, beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan laba bersih) perusahaan tambang batu bara dengan setoran pajak penghasilan badan pada 10 perusahaan tambang pemegang Kuasa Pertambangan (KP) di Samarinda pada tahun 2013-2015.

### **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan secara umum tentang penyajian akuntansi keuangan terutama laporan laba rugi dan akuntansi pajak terutama penyeteroran dan pelaporan PPh Badan terutang. Secara khususnya adalah pengaruh unsur-unsur laba

rugi dengan setoran PPh Badan serta bagaimana perusahaan tambang batubara menyajikan laporan laba-ruginya untuk menekan setoran PPh Badan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak akademisi yang mendalami perpajakan dan akuntansi pajak sebagai referensi umum pengaruh nyata unsur-unsur laporan laba rugi sebagai dasar pembayaran dan pelaporan PPh Badan Perusahaan Tambang Batubara untuk dikelola lebih lanjut. Kegunaan lainnya adalah untuk pengetahuan bagaimana Wajib Pajak Badan Sektor Pertambangan Batubara mengakui, mengukur dan menyajikan akun-akun laporan laba rugi-nya untuk menghindari pajak (tax avoidance) yang sehat dan sesuai ketentuan.

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi tentang analisa data-data terdahulu atas Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan perusahaan tambang batubara bagi petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan Wajib Pajak (WP) Badan sektor pertambangan batubara. Dan juga berguna sebagai menyusun laporan laba rugi dan SPT Tahunan PPh Badan yang sesuai dengan ketentuan berlaku dan memaksimalkan peraturan-peraturan perpajakan yang menguntungkan bagi Wajib Pajak Badan Usaha.

## **DASAR TEORI**

### **A. Akuntansi Keuangan**

Menurut Warren Reeve Fess (2008:15) menyatakan akuntansi keuangan adalah pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan ekonomi perusahaan. Walaupun laporan tersebut menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer, namun hal itu merupakan laporan utama bagi pemilik, kreditor, lembaga pemerintah dan masyarakat umum.

E. Kieso dan Weygandt dalam *Intermediate Accounting* (2011:44) mendefinisikan laporan keuangan adalah sarana utama dimana perusahaan mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak luar. Pernyataan ini menyajikan informasi sejarah perusahaan yang dihitung dalam bentuk uang. Laporan keuangan yang paling sering disediakan adalah dalam bentuk (1) pernyataan laporan keuangan posisi

keuangan, (2) laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif, (3) laporan arus kas, (4) laporan perubahan ekuitas. Catatan pengungkapan atau catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap laporan keuangan.

## **B. Akuntansi Perpajakan**

Pengertian pajak menurut Waluyo (2009: 3) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang Terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunyi Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan penghitungan pajak. UU pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda.

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya terkait, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, WP harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang

dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan/koreksi fiskal lebih dulu sebelum menghitung besarnya PKP.

Perbedaan antara laba secara komersial dengan Penghasilan Kena Pajak adalah dilakukannya koreksi fiskal terhadap laba secara komersial. Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, karena tidak semua ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan digunakan dalam peraturan perpajakan.

Dengan demikian, rekonsiliasi/koreksi fiskal dapat diartikan sebagai usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa beda tetap dan beda waktu.

Perbedaan-perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal adalah perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan, perbedaan konsep biaya (cost) beban (expense), dan perbedaan dalam konsep penyusutan dan nilai persediaan. Atas hal-hal tersebut perlu dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengukuran, pengakuan, dan penyajian akun-akun penjualan, beban penyusutan dan beban pemeliharaan antar perusahaan tambang batubara relatif sama satu dengan lainnya. Proses bisnis dan transaksi-transaksi pemupukan pendapatan dan pengeluaran beban tentunya tidak ada bedanya dari satu perusahaan dengan yang lainnya. Sehingga korelasi antara besaran laba dengan PPh Badan terutang setiap perusahaan jika dibandingkan atau diekualisasi seharusnya berbanding lurus.

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori di atas, maka dinyatakan rumusan hipotesis untuk penelitian ini adalah: keseluruhan unsur laporan laba rugi (total penjualan, laba kotor, beban penyusutan,

beban pemeliharaan, dan laba bersih) secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang.

## METODE PENELITIAN

### A. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini populasi diambil dari keseluruhan perusahaan tambang batu bara yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda dengan kode klasifikasi usaha 05101 menurut Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang menandakan itu adalah Wajib Pajak tambang batu bara. Terdapat 247 perusahaan tambang batu bara yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Samarinda.

Untuk melakukan penelitian ini digunakan metode pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling menurut Sugiyono (2013:218) adalah “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau kriteria tertentu”. Kriteria purposive sampling pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 : Kriteria Purposive Sampling**

No.	Kriteria Seleksi Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan batu bara yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda	247
2.	Melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013 – 2015	37
3.	Melaporkan laporan keuangan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013 - 2015	37
4.	Laporan Keuangan pada Tahun 2013 – 2015 bersifat surplus/laba bersih positif	10
5.	Melakukan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan pada 2013 – 2015	10
	Jumlah sampel terpilih	10

Sampel yang terpilih dari teknik purposive sampling ini dan yang akan menjadi objek penelitian adalah sebanyak 10 Wajib

Pajak. Berdasarkan Pasal 34 Undang – Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa identitas Wajib Pajak adalah rahasia negara, sehingga penulis hanya bisa menampilkan inisial dari 10 Wajib Pajak yang menjadi objek penelitian ini

### B. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis laporan keuangan horizontal yaitu menganalisis laporan laba rugi fiskal yang ada di SPT dari tahun ke tahun. Dengan mengadakan analisis data fiskal dari tahun ke tahun yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari perusahaannya serta hasil-hasil yang telah dianggap cukup baik. Jangkauan SPT Tahunan yang diteliti adalah sepuluh SPT Tahunan tahun pajak 2013-2015 pada perusahaan batu bara yang terdaftar sebagai Wajib Pajak KPP Pratama Samarinda yang memenuhi kriteria dalam *purposive sampling*.

### C. Alat Analisis

1. Melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan pengakuan peredaran usaha pada PPh Badan Pasal 29.
2. Mengumpulkan variabel-variabel dari 10 SPT yang akan diteliti.
3. Melakukan Uji Normalitas.
4. Melakukan Uji Asumsi Klasik seperti uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.
5. Melakukan analisis regresi linear berganda.
6. Melakukan uji F dan uji t untuk pengujian hipotesis.

## HASIL PENELITIAN

### A. Deskripsi Data

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda atau yang biasa disingkat KPP Pratama Samarinda merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di bawah lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara yang mewilayahi Kota Samarinda. Kantor tersebut beralamat di Jl. MT Haryono No 17, Air Putih, Samarinda Ulu, Kota Samarinda 75117 dengan kode kantor 722. Kantor tersebut saat penulis membuat karya

ilmiah ini memiliki 105 orang pegawai dengan berbagai macam tugas pokok jabatan dan fungsi.

KPP Pratama Samarinda sama halnya dengan KPP lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas KPP Pratama Samarinda dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

**Gambar 1 : Struktur Organisasi KPP Pratama Samarinda**



Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh di lapangan. Data yang disajikan adalah data sekunder yang diperoleh dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atas pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 - 2015 pada 10 Wajib Pajak yang dijadikan sampel penelitian.

Adapun 10 Wajib Pajak yang dijadikan sampel penelitian adalah :

1. CV. MJ
2. CV. SBJ
3. CV. BRA
4. PT. HC
5. PT. DUM
6. CV. W
7. CV. L
8. PT. AC
9. CV. BN
10. PT. ADP

Atas sampel penelitian tersebut, data yang disajikan dalam deskripsi data ini adalah data penjualan, data laba kotor, data beban penyusutan, data beban pemeliharaan, dan data laba bersih yang ada di SPT Tahunan PPh Badan yang telah diolah dalam Jutaan Rupiah. Untuk mempermudah agar data yang diuji menjadi normal, maka data fiskal SPT

Tahunan PPh Badan 10 Wajib Pajak yang menjadi sampel penelitian yang dihasilkan tersebut perlu dilakukan penormalan data dengan menggunakan fungsi LN (angka).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendukung dan atau menjelaskan hasil pembuktian analisis kuantitatif. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan dengan menggunakan model regresi linier berganda. Untuk memudahkan dan mempercepat perhitungan hasil analisis kuantitatif, digunakan alat bantu program SPSS (Statistic Program For Social Science) 23.00.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mendeteksi apakah model regresi yang dirumuskan serta variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat terdistribusi normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik apabila memiliki data yang dapat terdistribusi normal. Uji normalitas ini dapat diketahui dengan dua cara analisis, yaitu analisis grafik dan uji statistik Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 5.2  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	LnY	LnX <sub>1</sub>	LnX <sub>2</sub>	LnX <sub>3</sub>	LnX <sub>4</sub>	LnX <sub>5</sub>	
N	30	30	30	30	30	30	
Normal	Mean	16,86	23,14	21,93	19,99	18,66	18,52
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	2,09	1,58	1,53	1,75	1,10	2,15
Most Extreme	Absolute	,118	,126	,117	,111	,188	,133
Differences	Positive	,092	,126	,094	,109	,140	,086
	Negative	-,118	-,088	-,117	-,111	-,188	-,133
Test Statistic		,118	,126	,117	,111	,188	,133
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>	,200 <sup>c,d</sup>	,200 <sup>c,d</sup>	,200 <sup>c,d</sup>	,008 <sup>c</sup>	,185 <sup>c</sup>

Sumber : Output SPSS

Pada tabel di atas nampak bahwa nilai N = 30 data maka nilai signifikansinya Sig (2-tailed) harus > 0,05 untuk menunjukkan bahwa asumsi normalitas nilai residual telah terdistribusi secara normal. Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-smirnov test Asymp. Sig sebesar 0,200 untuk variabel Y, X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, dan sebesar 0,008 untuk variabel X<sub>4</sub>, serta sebesar 0,185 untuk variabel X<sub>5</sub> sehingga nilai seluruh Asymp. Sig lebih besar dari 0,05 yang

berarti variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pedoman model regresi yang bebas multikolinearitas adalah dengan melihat besaran di collinearity statistics yang mempunyai nilai VIF multikolinearitas kurang dari 10 dan toleransinya di atas angka 0,1.

**Tabel 2 : Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
LnX1	,180	5,570
LnX2	,184	5,435
LnX3	,342	2,927
LnX4	,524	1,909
LnX5	,357	2,799

Dari tabel hasil uji Coeficients Model terlihat bahwa nilai VIF seluruh variabel independen berada pada angka 1 - 10 dan nilaitoleransinya adalah diatas angka 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi merupakan persamaan regresi yang baik.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dianalisis dengan uji Glejser dengan cara menguji nilai absolut residual. Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi nilai absolut maka ada indikasi heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika variabel independen tidak mempengaruhi nilai absolut maka tidak ada indikasi heteroskedastisitas.

**Tabel 3 : Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,026	10,758		,746	,463
LnX1	3,490	3,076	2,190	1,135	,268
LnX2	-1,171	1,137	-,713	-1,030	,314
LnX3	-,291	,453	-,202	-,642	,527
LnX4	-,524	,595	-,229	-,882	,387
LnX5	,148	,394	,126	,375	,711

a. Dependent Variable: res3

Berdasarkan hasil output heteroskedastisitas, dengan menguji Koefisien

Regresi antara Ln(Residu2) dengan variabel independen menunjukkan Sig > 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel-variabel di atas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model linier ada korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data time series. Konsekuensi dari adanya autokorelasi dari suatu model regresi adalah varian sampel yang tidak dapat menggambarkan varian populasinya.

**Tabel 4 : Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,953 <sup>a</sup>	,909	,890	0,000000	1,864

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan uji Autokorelasi test diperoleh nilai durbin watson sebesar 1,864 sesuai dengan tabel Durbin Watson bahwa dengan jumlah variabel 5 dan jumlah data 30 maka dU sebesar 1,8326 dan dL sebesar 1,0706 maka skala Durbin Watson di atas dU (1,8326) < Durbin Watson (1,864) < 4-dL (4-1,0706), maka dapat dikatakan bahwa data statistik di atas tidak terdapat autokorelasi.

e. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji correlation berdasarkan output SPSS versi 23 terhadap variabel independen yang terdiri dari Penjualan, Laba Kotor, Beban Pemeliharaan, Beban Penyusutan, dan Laba Bersih terhadap PPh Badan Terutang ditunjukkan pada tabel berikut:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,953 <sup>a</sup>	,909	,890	0,69618

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8,395	2,682		-3,130	,005
	LnX1	,402	,192	,304	2,092	,047
	LnX2	,041	,196	,030	,210	,835
	LnX3	-,034	,126	-,028	-,268	,791
	LnX4	,249	,162	,131	1,541	,136
	LnX5	,597	,100	,615	5,960	,000

a. Dependent Variable: LnY

Berdasarkan tabel di atas, di dapat nilai statistik dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{PPh Badan} = -8,39 + 0,40 X1 + 0,04 X2 - 0,03 X3 + 0,25 X4 + 0,60 X5$$

f. Uji F (ANOVA)

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang diteliti secara bersama-sama terhadap variabel terikat dilakukan dengan uji statistik F sebagai berikut :

**Tabel 5 : Uji F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	115,856	5	23,171	47,81	,000 <sup>b</sup>
	Residual	11,632	24	,485		
	Total	127,487	29			

a. Dependent Variable: LnY

b. Predictors: (Constant), LnX5, LnX4, LnX3, LnX2, LnX1

F hitung > F tabel yaitu 47,81 > 2,62 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka H0 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa Penjualan, Laba Kotor, Beban Pemeliharaan, Beban Penyusutan dan Laba Bersih secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang.

g. Uji t

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang diteliti secara parsial terhadap variabel terikat dilakukan dengan Uji t sebagai berikut. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sebagai berikut:

**Tabel 6 : Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8,395	2,682		-3,130	,005
	LnX1	,402	,192	,304	2,092	,047
	LnX2	,041	,196	,030	,210	,835
	LnX3	-,034	,126	-,028	-,268	,791
	LnX4	,249	,162	,131	1,541	,136
	LnX5	,597	,100	,615	5,960	,000

Sumber : Output SPSS

Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan antara Penjualan dan Laba Bersih dengan PPh Badan Terutang namun tidak ada pengaruh yang signifikan antara Laba Kotor, Beban Pemeliharaan dan Beban Penyusutan dengan PPh Badan Terutang.

h. Uji Koefisien Determinasi (R<sub>2</sub>)

**Tabel 7 : Uji Koefisien Determinasi (R<sub>2</sub>)**

Pada tabel diatas angka R Square adalah 0,909 yaitu hasil kuadrat dari koefisien korelasi (0,953x 0,953= 0,909). Jika dilihat pada tabel 5.1 analisis deskriptif statistik di atas yang menyatakan bahwa standar deviasi PPh Badan Terutang adalah 2,09669 yang mana jauh lebih besar dari Std. Error of the Estimate pada tabel model summary R sebesar 0,69618. Oleh karena standar deviasi nilai PPh Badan Terutang jauh lebih besar, maka model regresi dikatakan baik dalam bertindak sebagai predictor PPh Badan Terutang.

**B. Pembahasan**

PPh Badan terutang secara umum berhubungan lurus dengan penjualan, laba kotor dan laba bersih serta berhubungan terbalik dengan beban pemeliharaan dan beban penyusutan. Jika hal tersebut tidak terjadi, dapat diasumsikan bahwa terdapat komponen-komponen dalam penjualan, beban pemeliharaan dan beban penyusutan yang dialihkan ke Komponen Laba Rugi Lainnya yang menguntungkan Wajib Pajak Badan Usaha.

Hal ini bisa terjadi karena untuk mengurangi PPh Badan terutang dapat dilakukan dengan upaya-upaya meminimalkan pendapatan dan meningkatkan biaya. Dengan menyembunyikan transaksi penjualan pada unsur-unsur yang tidak dikenakan pajak membuat seolah-olah penjualan yang tinggi tidak mempengaruhi peningkatan PPh Badan terutang, begitu juga dengan memaksimalkan biaya-biaya lainnya yang mempengaruhi jumlah PPh Badan terutang, terutama dengan memanipulasi biaya penyusutan yang memiliki perbedaan kebijakan pada akuntansi keuangan dan pada akuntansi perpajakan.

Kesimpulan berdasarkan uji t, hanya variabel Penjualan dan Laba Bersih yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel PPh Badan Terutang. Namun untuk variabel Laba Kotor, Beban Pemeliharaan dan Beban Penyusutan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel PPh Badan Terutang.

Semakin tinggi variabel penjualan dan variabel laba bersih tentunya sangat berpengaruh terhadap besarnya variabel PPh Badan terutang. Namun variabel laba kotor seharusnya juga mempengaruhi positif

variabel PPh Badan terutang secara signifikan. Ketika variabel laba kotor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel PPh Badan terutang, hal tersebut dapat terjadi karena banyak beban-beban yang tidak berhubungan dengan operasional perusahaan yang dibebankan ke variabel harga pokok penjualan sehingga variabel laba kotor (penjualan – harga pokok penjualan) tidak merepresentasikan pengaruh yang sangat signifikan atas besarnya PPh Badan terutang.

Variabel beban pemeliharaan dan variabel beban penyusutan tidak berpengaruh secara signifikan tentunya menjadi pertanyaan mengapa komponen beban operasional penyumbang terbesar pengurang PPh Badan terutang justru tidak berpengaruh secara signifikan. Perusahaan tambang batu bara lokal yang tidak termasuk di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan scoop dan modal tingkat menengah akan lebih banyak menggunakan alat-alat produksi dengan cara menyewa ataupun menggunakan jasa kontraktor pertambangan, sehingga dapat melakukan efisiensi produksi dan meningkatkan produktifitas perusahaan tanpa dibebani pemeliharaan dan penyusutan aset.

Dengan cara menyewa alat berat dan menggunakan jasa kontraktor pertambangan, perusahaan tambang batu bara tidak terlalu banyak membebankan beban pemeliharaan dan beban penyusutan karena kepemilikan aktiva tetap tersebut merupakan milik pihak lain. Pengganti dari beban pemeliharaan dan beban penyusutan, perusahaan tambang batu bara yang melakukan sewa alat akan membebankan biaya pembelian sparepart dan bahan bakar atas penggunaan alat tersebut kepada komponen variabel harga pokok penjualan.

Melihat pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan unsur laporan laba rugi (total penjualan, laba kotor, beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan laba bersih) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang. Sehingga **H<sub>1</sub> ditolak**.

Sesuai hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Penjualan (X1), Laba Kotor (X2) Beban Pemeliharaan (X3), Beban Penyusutan (X4) dan Laba Bersih (X5) dengan PPh Badan

Terutang (Y) mempunyai hubungan yang signifikan yaitu sebesar 47,81 jauh lebih besar dibanding F tabel sebesar 2,62 sehingga seluruh variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

Hasil kuadrat dari koefisien korelasi ( $0,953 \times 0,953 = 0,909$ ). Jika dilihat pada tabel 5.1 analisis deskriptif statistik di atas yang menyatakan bahwa standar deviasi PPh Badan Terutang adalah 2,09669 yang mana jauh lebih besar dari Std. Error of the Estimate pada tabel model summary R sebesar 0,69618. Oleh karena standar deviasi nilai PPh Badan Terutang jauh lebih besar, maka model regresi dikatakan baik dalam bertindak sebagai predictor PPh Badan Terutang.

Berdasarkan data pada tabel coefficient diatas maka dapat dikatakan konstanta sebesar -8,395, koefisien regresi X1 sebesar 0,40, koefisien regresi X2 sebesar 0,04, koefisien regresi X3 sebesar -0,03, koefisien regresi X4 sebesar 0,25, koefisien regresi X5 sebesar 0,567. Sehingga persamaan regresi linear berganda dapat dijabarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = -8,395 + 0,40 X1 + 0,04 X2 - 0,03 X3 + 0,25 X4 + 0,60 X5$$

Melihat pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan unsur laporan laba rugi (total penjualan, laba kotor, beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan laba bersih) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang sehingga **H<sub>2</sub> diterima**.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka mengurangi PPh Badan Terutang antara lain:

1. Penjualan batubara yang dikeluarkan dari objek PPh Badan dengan cara menyembunyikan transaksi batubara yang terjual dan memanipulasi waktu dan kebijakan pengakuan pendapatan atas transaksi batubara yang terjual sehingga tidak diakui oleh pembukuan pada tahun tersebut.
2. Harga Pokok Batubara yang terjual dimanipulasi sedemikian rupa sehingga biaya yang seharusnya tidak dipekerkenankan sebagai pengurang pajak disisipkan ke Harga Pokok Penjualan.

3. Nilai rata-rata (mean) beban pemeliharaan yang melebihi nilai rata-rata (mean) beban penyusutan dan juga angka koefisien variabel beban pemeliharaan pada persamaan regresi yang bersifat negatif, hal ini jelas mengindikasikan bahwa pos beban pemeliharaan kerap dijadikan tempat untuk menumpuk beban yang seharusnya tidak menjadi pengurang perhitungan pajak namun diperlakukan sebaliknya guna mengurangi nilai PPh Badan Terutang dengan cara seperti transaksi hubungan istimewa dalam aspek perpajakan (Transfer Pricing) atau memasukkan unsur biaya yang tidak boleh dibiayai menurut peraturan perpajakan yang berlaku (Non Deductible Expense).

4. Pengakuan beban penyusutan perusahaan pada akuntansi keuangan komersial berbeda dengan pengakuan beban penyusutan pada akuntansi perpajakan, dengan mengakui biaya-biaya tertentu dikapitalisasi ke aset tetap, tentunya akan menambah beban penyusutan di perpajakan. Hal ini yang sering dilakukan pengusaha-pengusaha untuk melakukan tax avoidance.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Keseluruhan unsur laporan laba rugi (total penjualan, laba kotor, beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan laba bersih) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t dimana terdapat variabel laba kotor, beban pemeliharaan dan beban penyusutan yang nilai hitung nya lebih kecil daripada ttabel sehingga kesimpulannya  $H_1$  ditolak.

Keseluruhan unsur laporan laba rugi (total penjualan, laba kotor, beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan laba bersih) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji F dimana seluruh variabel independen memiliki nilai Fhitung yang lebih besar daripada Ftabel sehingga kesimpulannya  $H_2$  diterima.

Variabel laba kotor (penjualan dikurangi harga pokok penjualan) yang tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel PPh Badan terutang sedangkan variabel penjualan ikut berpengaruh secara signifikan, patut diduga bahwa variabel harga pokok penjualan merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk menyembunyikan beban-beban lainnya yang seharusnya menjadi koreksi fiskal positif di SPT Tahunan PPh Badan dengan mengalokasikannya ke Harga Pokok Penjualan.

Variabel beban pemeliharaan dan variabel beban penyusutan tidak berpengaruh secara signifikan tentunya menjadi pertanyaan mengapa komponen beban operasional penyumbang terbesar pengurang PPh Badan terutang justru tidak berpengaruh secara signifikan. Perusahaan tambang batu bara lokal yang tidak termasuk di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan scoop dan modal tingkat menengah akan lebih banyak menggunakan alat-alat produksi dengan cara menyewa ataupun menggunakan jasa kontraktor pertambangan, sehingga dapat melakukan efisiensi produksi dan meningkatkan produktifitas perusahaan tanpa dibebani pemeliharaan dan penyusutan aset.

Perusahaan tambang yang memiliki sendiri aset/aktiva tetap untuk alat produksinya juga akan membebaskan beban penyusutan, namun akan terjadi perbedaan penghitungan beban penyusutan pada laporan keuangan yang menggunakan akuntansi keuangan dengan penyajian di SPT Tahunan PPh Badan yang menggunakan akuntansi perpajakan. Seandainya Wajib Pajak tidak melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangannya, maka beban penyusutan adalah salah satu cara melakukan strategi tax avoidance karena nilai beban yang disajikan lebih besar dari seharusnya.

### **B. Saran**

Bagi instansi Direktorat Jenderal Pajak, pihak auditor pajak sebaiknya lebih memperhatikan akun harga pokok penjualan karena seringkali digunakan sebagai akun penimbun transaksi-transaksi pengurang PPh Badan Terutang pada perusahaan tambang batu bara. Akun harga pokok penjualan merupakan akun biaya yang diperbesar oleh perusahaan tambang karena pada komponen tersebut selain ditagih dengan PPh Badan, juga

dipungut PPN serta kewajiban perusahaan membayar Royalti Kepada Pemerintah atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga memunculkan banyak celah untuk melakukan strategi tax avoidance di dalamnya.

Bagi peneliti di masa mendatang, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut atas komponen-komponen biaya lainnya seperti beban hiburan (entertainment), transaksi hubungan istimewa pada aspek perpajakan (transfer pricing) dan kenikmatan berbentuk pemberian/fasilitas khusus pada pegawai perusahaan karena jabatannya yang umumnya merupakan pos-pos biaya yang dikoreksi fiskal positif di SPT Tahunan PPh Badan karena tidak boleh dibiayakan.

Bagi perusahaan tambang batu bara, sebaiknya terdapat peningkatan kepatuhan dalam pembukuan laporan keuangan dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan karena itu merupakan kewajiban Wajib Pajak yang telah diatur di dalam Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- \_\_\_\_\_. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- E. Kieso, Donald, Jerry J, Weygandt and Teery D. Warfield. 2015. Intermediate Accounting, 12th Edition. New Jersey : John Wiley & Sons.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit-Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta
- Waluyo. 2009. Akuntansi Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
- Warren, Carl S, James M. Reeve, and Phillip E. Fess. 2008. Financial Accounting.13th Edition. Ohio : South-Western College Publishing.
- Wild, Jhon J, K.R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : Salemba Empat